

Faktor-Faktor Penyebab Krisis Politik di Ukraina

The Causes of Political Crisis in Ukraine

M. Zulfiekar H. A. C, Sri Yuniati.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: zulfiekar.mohammad@gmail.com s.yuniati@rocketmail.com

Abstract

Ukraine had an internal conflict which caused by massive demonstration from the people. In November the 21st 2013, Yanukovych President decided to postpone the meeting with European Union about Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). The meeting's postpone provoke Ukrainian people's anger. The political crisis also caused by ukrainian people's refusal about Yanukovych president's decision to cooperate with Russia. This cooperation between Ukraine and Russia showed by Yanukovych's statement which said that the free trade agreement between Ukraine and EU endangered Ukraine and Russia's market trading. To build a solid cooperation with Ukraine, EU must offer enormous financial compensation, but this requirement has been denied by EU's leader.

Keywords: Ukraine, political crisis, collective action

Pendahuluan

Adrian Leftwich di dalam bukunya *What is Politics ? The Activity and Its Study*. (Leftwich, 1984:64) menjelaskan bahwa politik merupakan pusat dari semua kegiatan sosial kolektif baik formal maupun informal, publik maupun privat, yang dilakukan oleh sekelompok manusia atau lembaga-lembaga serta masyarakat mulai dari

interaksi sosial keluarga sampai interaksi di dalam bangsa dan atau lintas negara. Politik berbeda dari interaksi sosial biasa, politik melahirkan kekuasaan yang memperhatikan penciptaan, pendistribusian dan penggunaan sumber-sumber keberadaan sosial manusia. Umumnya, politik merupakan segala kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan

tujuan dari sebuah sistem dan melaksanakan tujuan dari sistem tersebut. (Surbakti, 1992:1) Politik memunculkan dimensi kekuasaan pengambilan keputusan, kekuasaan atas mengatur perintah dan kekuasaan atas kontrol pemikiran.

Ukraina sedang dilanda masalah dalam negeri yang disebabkan adanya demonstrasi secara *massive* dari rakyat. Pada tanggal 21 November 2013, Presiden Yanukovych memutuskan untuk menunda pembicaraan dengan Uni Eropa mengenai *Deep and Comprehensive Free Trade Area(DCFTA)*. Penundaan pembicaraan dengan Uni Eropa ini memicu kemarahan penduduk Ukraina. Mereka turun ke jalan untuk menuntut Presiden Yanukovych menandatangani kesepakatan dengan Uni Eropa. Kesepakatan dengan Uni Eropa dinilai akan menciptakan hubungan yang lebih erat baik dalam bidang politik maupun untuk pertumbuhan ekonomi. (Anonim, Juni 2014) Uni Eropa telah mempertimbangkan pentingnya Ukraina sebagai bagian integral dari Eropa dan bertujuan khusus untuk pengembangan hubungan yang saling menguntungkan. Uni Eropa dan Ukraina telah menandatangani berbagai perjanjian contohnya seperti penandatanganan perjanjian di Brussels, Belgia. (Primus, 2014) Ukraina memahami arti penting untuk membangun hubungan dekat dengan Eropa, bahkan Ukraina berkeinginan untuk menempatkan reformasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan negaranya ke Uni Eropa pada 10-15 tahun ke depan.(Kuzmin,2012:1)

Krisis politik juga disebabkan oleh rakyat Ukraina yang menolak aksi Presiden Yanukovych yang bekerja sama dengan bekas induk negaranya yaitu Rusia. Hal ini diperkuat melalui argumen Presiden Yanukovych yang menyatakan bahwa hubungan perdagangan bebas dengan Uni Eropa akan membahayakan perdagangan Ukraina dengan Rusia. Untuk menjalin kerja sama dengan Ukraina, Uni Eropa harus menawarkan kompensasi finansial yang cukup besar, namun hal tersebut ditolak oleh pemimpin Uni Eropa.

Pada tanggal 1 Desember 2013, sekitar 100.000-500.000 orang berkumpul dan berunjuk rasa di Kiev yang menyebabkan terjadinya bentrok di dekat gedung kepresidenan. Selain itu, sejumlah demonstran yang menggunakan senjata api dihalau oleh polisi anti huru-hara menggunakan gas air mata. Hal tersebut mengakibatkan puluhan demonstran serta 100 polisi mengalami luka-luka. (Anonim, 2013) Para pemimpin oposisi di Ukraina menuntut untuk mengetahui rincian kesepakatan bantuan dana senilai \$15 Miliar dan pemotongan harga penjualan gas ke Ukraina oleh Rusia yang dilakukan oleh Presiden Victor Yanukovych (Ukraina) dan Presiden Vladimir Putin (Rusia) pada tanggal 17 Desember 2013. (Thomas, 2013)

Kesepakatan tersebut memicu kemarahan dari masyarakat Ukraina. Kemarahan masyarakat Ukraina ditunjukkan dengan munculnya demonstrasi massa yang bergerak ke arah kekacauan. Demonstrasi yang dilakukan tanggal 22 Januari 2014 ini menyebabkan beberapa

demonstran tewas. Dalam gerakan massa tersebut, terjadi proses negosiasi antara Presiden Yanukovych dan pemimpin oposisi. Negosiasi ini menghasilkan ancaman dan ultimatum bagi para demonstran.(Herszenhorn, 2014) Pada tanggal 28 Januari 2014, Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov mengundurkan diri sebelum parlemen memberlakukan mosi tidak percaya yang bisa menjatuhkan kekuasaannya.(Kramer, 2014)

Rakyat Ukraina selalu menyerukan bahwa Ukraina adalah negara anggota dari Uni Eropa dan menolak tindakan Presiden Yanukovych yang melakukan kesepakatan dengan Rusia. Pada tanggal 31 Januari 2014, Pemerintah bersedia memberikan amnesti kepada para demonstran dan menghapuskan pelanggaran mereka, dengan cara memenuhi dua syarat yang diajukan oleh pemerintah. Syarat pertama, seluruh pengunjuk rasa menghentikan aksi protes mereka dan meninggalkan jalanan yang selama ini menjadi panggung mereka. Syarat kedua, oposisi mengosongkan gedung-gedung pemerintah yang mereka duduki.(Tia, 2014)

Setelah krisis politik yang hebat selama tiga bulan dan aksi demonstrasi menentang pemerintah. Keadaan tersebut berakhir dengan keputusan Parlemen Ukraina memecat Presiden Viktor Yanukovych pada tanggal 22 Februari 2014.(Anonim, 2014) Parlemen Ukraina menyatakan bahwa Presiden Viktor Yanukovych tidak mencukupi kemampuan untuk memegang jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Rakyat Ukraina dalam berbagai aksi

protes sebulan terakhir seolah mengulang sikap patriotik pendahulunya yang mencoba melepaskan diri dari Rusia. Rakyat Ukraina setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton bahwa Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin menjalankan taktik pemerasan dan mengikat negara Ukraina sebagai dampak dari kebijakan Sovietisasi. Rakyat Ukraina kemudian melakukan protes di Kiev, ibukota negara Ukraina sebagai aspirasi untuk menyuarkan kekuatan dalam mengancam dominasi Rusia di negaranya. Aksi protes tersebut berisi penolakan terhadap situasi *sovok* yaitu ejekan yang menggambarkan situasi negara Ukraina ketika dikendalikan Soviet selama puluhan tahun.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka tulisan ini hendak menganalisis tentang faktor-faktor penyebab krisis politik di Ukraina.

1.2 Landasan Konseptual

Suatu permasalahan yang diangkat harus mempunyai landasan teori untuk menganalisa. Konsep yang diharapkan akan mempermudah dalam memahami dan menangkap maksud dari tulisan ini.

Mochtar Mas'ood memberikan batasan tentang definisi konsep sebagai berikut:

“Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan sesuatu gagasan. Ia bukan sesuatu yang asing, kita menggunakannya sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-cirinya yang

relevan bagi kita.” (Mas’oed, 1989:93)

Selanjutnya Plano juga mendefinisikan tentang konsep yaitu :

“Konsep adalah suatu gambaran atau gagasan jiwa yang dibentuk atas dasar penggeneralisasian sifat-sifat kelompok benda. Konsep adalah suatu abstraksi yang melahirkan deskripsi. Oleh karena itu ia bisa diterapkan pada hal-hal khusus dari suatu penggolongan yang bersangkutan dengan konsep.”(Plano, 1982:38)

Landasan teori adalah landasan berpijak dalam pemikiran suatu pendapat dengan menggunakan teori-teori untuk memecahkan dan menganalisa permasalahan. Landasan teori yang ada digunakan untuk menjembatani antara permasalahan dengan argumen utama yang penulis ajukan. Landasan teori yang digunakan penulis adalah gerakan massa dan krisis legitimasi.

1.2.1 Krisis Politik

Menurut Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman Md. Yussof menjelaskan bahwa krisis politik adalah suatu keadaan negara yang mengalami instabilitas di dalamnya. Krisis politik berlaku karena hilangnya kepercayaan masyarakat atau anggota partai terhadap pemimpin mereka (Shukri dan Youssuf, 2003:178). Krisis politik biasanya disebabkan oleh ketiadaan pemimpin yang berwibawa untuk memimpin masyarakat tersebut. Krisis politik juga dapat muncul karena terdapat tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin mereka sendiri atau digunakan

sebagai kendaraan pihak lain guna mencapai kepentingannya.

Hal mendasar yang menyebabkan krisis politik dalam suatu negara adalah keamanan dan kestabilan ekonominya. Krisis politik juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain yaitu seperti perbedaan ideologi politik, faktor biologi, faktor budaya, potensi politik (strategis), ekonomi (sumber) dan adanya kesenjangan sosioekonomi yang tinggi (Shukri dan Youssuf, 2003:178).

Krisis politik di Ukraina disebabkan oleh perbedaan ideologi antara rakyat Ukraina dan Presiden Victor Yanukovych. Rakyat Ukraina menginginkan pemerintahan Ukraina bekerja sama dengan Uni Eropa dalam bidang perekonomian namun bertolak belakang dengan pemikiran pemerintah Ukraina yang lebih memilih bekerja sama dengan Rusia dalam bidang ekonomi.

1.2.2 Krisis Legitimasi

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi bisa mengarah ke arah positif juga bisa ke arah negatif. Dalam mendefinisikan legitimasi, lembaga – lembaga negara lah yang menentukan pemerintahan sah atau tidak. David Easton mengatakan dalam bukunya yang berjudul *A System Analysis Of Political Life*(Easton, 1979:171) terdapat tiga objek legitimasi yaitu meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintah.

Jika dalam pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan terdapat *lack of trust* dari yang diperintah dapat menyebabkan suatu gejala politik yang baru yaitu krisis legitimasi. Krisis legitimasi adalah suatu keadaan tidak adanya kepercayaan penuh dari rakyat terhadap pemerintahan. Krisis legitimasi bisa menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Krisis politik yang terjadi di Ukraina ini terjadi karena rakyat Ukraina tidak percaya lagi terhadap Presiden yang pernah digulingkan pada saat terjadinya Revolusi Oranye pada tahun 2004, Victor Yanukovych yang menunda bertandatangan perjanjian dengan Uni Eropa yang menjadi induk negara – negara Eropa dalam bidang perdagangan yang tertuang dalam *Deep and Comprehensive Free Trade Area(DCFTA)*.

1.2.3 Gerakan massa

Timur Mahardika dalam bukunya yang berjudul *Gerakan Massa* membagi gerakan massa menjadi dua macam, yaitu gerakan massa spontan dan gerakan massa terorganisir.(Mahardika, 2000:15) Gerakan massa spontan diartikan sebagai gerakan tanpa sebab yang jelas dan tidak menggunakan perencanaan yang matang dalam melakukan aksi-aksinya karena tidak terorganisir. Gerakan ini umumnya tidak memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan aksi (berpartisipasi). Sedangkan, gerakan massa terorganisir memiliki tujuan yang jelas dalam menyampaikan aspirasinya karena menggunakan strategi (perencanaan) yang baik dan didasarkan pada alasan analisis yang kuat. Charles Tilly dalam

bukunya *From Mobilization to Revolution*, mengemukakan bahwa gerakan massa memiliki lima komponen penting yang menjadi artikulasi perilaku partisipasi politik dalam berbagai bentuk. Kelima komponen tersebut antara lain sebagai berikut,(Tilly, 1977:48). Berdasarkan teori Charles Tilly tersebut, aksi kolektif tidak akan dilakukan hanya karena ketidakpuasan dari masing-masing individu saja tetapi juga ketika para individu itu diorganisasikan dan memiliki sumber daya. Selain itu, adanya kesempatan yang tepat atau bahkan ancaman, baik dari pemerintah maupun kelompok lain (pesaing), terhadap mereka yang telah memiliki *power* (terorganisir dan memiliki sumber daya) juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku kelompok tersebut menjadi non konvensional.

Charles Tilly juga menjelaskan dalam suatu aksi kolektif di dalamnya akan terdapat kekerasan secara kolektif pula (Tilly, 2003:15). Dalam kasus krisis politik di Ukraina ini terdapat hubungan antara *broken negotiation* dan *brawls*. Kasus krisis politik di Ukraina berawal pada gagalnya negosiasi antara rakyat dan pemerintah sehingga terbentuk kelompok-kelompok massa yang berdemonstrasi menentang kebijakan pemerintahan Ukraina yang lebih condong melakukan kerjasama dengan Rusia dan menunda tawaran kerjasama dengan Uni Eropa sehingga menimbulkan bentrokan antara rakyat Ukraina yang menyuarakan haknya agar Ukraina berintegrasi dengan Eropa dan meninggalkan Rusia melaan polisi yang mendapat

perintah dari pemerintah Ukraina agar mengusir para demonstran dari balai kota Kiev.

Krisis politik di Ukraina adalah gerakan massa yang terorganisir dikarenakan massa yang melakukan demonstrasi memiliki tujuan yang jelas yaitu mempertanyakan tindakan Presiden Yanukovich yang menunda menandatangani *Deep and Comprehensive Free Trade Area(DCFTA)* dengan Uni Eropa dan gerakan massa rakyat Ukraina berdasar pada ketidakpuasan rakyat Ukraina dengan tindakan Presiden Yanukovich yang memilih berpihak kepada Rusia. Rakyat Ukraina tidak percaya hubungan dengan Rusia akan menjamin masa depan yang menjanjikan.

HASIL PENELITIAN

4.1 Krisis Legitimasi

Stabilitas dan fungsi apapun dari suatu rezim politik baik itu demokrasi ataupun parlementer tergantung pada kombinasi dari kapasitas penguasa dan pejabat pemerintah untuk menggunakan paksaan dalam pengembangan legitimasi politik. Legitimasi politik adalah pengakuan masyarakat dan penerimaan validitas aturan sistem politik dan keputusan penguasa mereka. Dengan demikian, dua hal bisa diharapkan dari sistem politik yang memiliki tingkat yang cukup legitimasi politik. Pertama, sistem politik akan lebih tangguh bertahan pada periode krisis dan Kedua, penguasa dan otoritas akan menikmati kondisi fundamental yang diperlukan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif yaitu penguasa dan pejabat pemerintahan

akan mampu membuat keputusan dan mengikat sumber daya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari yang diperintah dan tanpa beralih ke pemaksaan untuk setiap keputusan.(Warren, 2008:519)

Krisis legitimasi mengacu pada penurunan kepercayaan dari fungsi administratif, lembaga atau kepemimpinan. Krisis legitimasi bisa menyebabkan terjadinya instabilitas politik dalam suatu negara.

Penyebab dari krisis legitimasi yaitu :

1. Perubahan prinsip kewenangan.
2. Persaingan antar pemimpin (*elite*) yang tidak tersalurkan sehingga terjadinya perpecahan dan kerapuhan pemerintahan.
3. Pemerintah tidak mampu memenuhi janjinya yang menyebabkan kekecewaan atau keresahan masyarakat.
4. Perubahan sosialisasi tentang kewenangan.

4.1.1 Dugaan Korupsi Victor Yanukovich

Korupsi adalah masalah yang terus berkembang dan tersebar di masyarakat Ukraina. Pada tahun 2012, *Transparency International Corruption Perceptions Index* menempatkan Ukraina di peringkat 114 diantara 178 negara yang diinvestigasi tingkat korupsinya. Ukraina berada satu tingkat dengan negara-negara seperti Bangladesh, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Suriah.(Parusinski,2012) Menurut Ernst&Young, Ukraina adalah salah satu dari tiga negara terkorup di dunia pada tahun 2012 bersama Colombia dan Brazil.(Tkachuk, 2011)

Presiden Victor Yanukovych banyak dituduh dengan korupsi di berbagai sektor. Pada Januari 2013, lebih dari setengah menteri dari kabinet Yanukovych merupakan warga Donbas atau orang yang berkarir disana. Donbas sendiri adalah tempat asal Presiden Yanukovych. Staf-staf nya seperti dari kepolisian, kejaksaan, dan pajak adalah orang Donbas. Alokasi dana pembangunan untuk wilayah Donbas sendiri adalah 0,62 miliar UAH (US\$76,2 Juta) hanya berbanding sedikit dengan alokasi pembangunan seluruh wilayah di Ukraina sejumlah 0,71 miliar UAH (US\$ 87,5 Juta).(Smith,2013) Anders Åslund, ahli ekonomi Swedia dan analis Ukraina menjelaskan konsolidasi kekuatan ekonomi Ukraina di tangan beberapa pengusaha ternama dan yang terkaya dan paling berpengaruh adalah anak Presiden Yanukovych, Oleksandr Yanukovych. Beberapa negara enggan untuk melawan keluarga Victor Yanukovych meskipun sistem ekonomi yang masih pro terhadap Ukraina dan Uni Eropa karena sistem ekonomi di Ukraina masih dibawah pengaruh Oleksandr Yanukovych.

Kepemilikan lahan ilegal seluas 140 hektar di Ukraina telah menjadi bukti keserakahan dan korupsi yang dilakukan oleh presiden Yanukovych. Gaji tahunan resmi sebagai presiden hanyalah US\$ 100 juta akan tetapi banyak bukti bahwa Yanukovych mendapat kiriman uang dari rekening yang tidak dikenal yang ditujukan di bank lokal Ukraina dan kegiatan penyelewengan kiriman uang tersebut semuanya tanpa pengawasan pemerintah.(Oliphant,2014) Di dalam

lahan sebesar 140 hektar tersebut terdapat mansion lima lantai, koleksi mobi mewah, rumah kaca dan hewan-hewan langka yang harga dari semua itu ditaksir jutaan dollar.

4.1.2 Penundaan Pembicaraan Dengan Uni Eropa

Keputusan Presiden Victor Yanukovych menunda pembicaraan dengan Uni Eropa dalam hal perjanjian perdagangan *Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA) mendapat banyak kritikan dan mengundang kekhawatiran dari banyak negara mengenai masa depan Eropa dalam bidang pasokan gas alam kedepannya. Keputusan penundaan pembicaraan dengan Uni Eropa tersebut diumumkan diantara para perwakilan negara Uni Eropa pada saat pertemuan di Vilnius, Lithuania. Keputusan Yanukovych bertolak belakang dengan negara-negara pecahan Rusia yang lain seperti Azerbaijan, Moldova dan Georgia yang memilih menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa tersebut. Akan tetapi, Yanukovych lebih memilih bekerjasama dengan Rusia karena Yanukovych berpendapat bahwa langkah awal ke arah Eropa bukan pilihan strategis berdasarkan kepentingan jangka panjang dari negaranya.(Zinets,2013) Keputusan tersebut sangat bertolak belakang dengan perintah Yanukovych yang menginginkan parlemen mempersiapkan untuk penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa sebelumnya. Presiden Yanukovych juga menginginkan parlemen untuk memberlakukan undang-undang yang terkait agar Ukraina dapat

diterima oleh Uni Eropa. Yanukovych mendapat ancaman dari Rusia bahwa Rusia akan menjatuhkan sanksi impor untuk Ukraina dan Putin juga mengingatkan Yanukovych bahwa ancaman yang dilakukan Rusia tersebut serius jika Ukraina menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa tersebut. (Nicolas, 2013) Yanukovych menyatakan bahwasannya Ukraina ingin berintegrasi dengan Uni Eropa tetapi kekuatan ekonomi Ukraina masih lemah bahkan dengan persiapan selama 4 tahun sebelum negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Pihak Uni Eropa menyadari bahwa Ukraina butuh investasi yang besar akan tetapi pihak Uni Eropa tidak bisa memberikan dana secara instan melainkan pendapatan di masa yang akan datang, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan yang tinggi dan kesejahteraan rakyat terjamin.

Latar belakang Yanukovych menolak kesepakatan perjanjian perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa salah satunya adalah uang. Dengan kondisi perekonomian Ukraina yang sedang terpuruk dan pemilihan presiden pada tahun 2015, kebutuhan akan pendanaan yang lebih besar tampaknya menjadi pertimbangan utama. Pemilu pada tahun 2015 bakal menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan Yanukovych kepada rakyatnya. Jika Yanukovych tidak menang dalam pemilihan umum tersebut, Yanukovych tidak hanya akan kehilangan harta kekayaannya saja akan tetapi tokoh oposisi yang ditahan oleh pemerintah Ukraina yaitu Yulia Tymoschenko yang akan memimpin Ukraina dan akan

kehilangan legitimasinya terhadap rakyat Ukraina. Penandatanganan kesepakatan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa bakal menaikkan legitimasi Yanukovych di hadapan rakyat Ukraina dan bakal mudah untuk mengalahkan rivalnya Yulia Tymoschenko melainkan Yanukovych memilih jalan lain yakni bertekad bahwa dengan dana yang besar maka dengan mudah memberi suap kepada rakyat yang tidak suka dengan gaya kepemimpinannya. Yanukovych menawarkan kepada Uni Eropa yaitu dengan bayaran US\$ 160 miliar kepada Ukraina jika menginginkan Ukraina yang demokratis dan modern.

Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite, yang saat ini memegang kendali sebagai presiden Uni Eropa menolak permintaan Yanukovych tersebut, dia mengungkapkan bahwa semua persyaratan tersebut tidak akan ada tawar-menawar lagi dan tidak ada ketentuan tambahan meskipun elite pemerintahan Ukraina tidak menyetujuinya. Uni Eropa mendapat dukungan dari rakyat Ukraina yang menginginkan Ukraina agar terintegrasi ke Uni Eropa bukan kembali ke Rusia. Selain bantuan dana tersebut, presiden Ukraina Victor Yanukovych meminta Uni Eropa untuk menyelesaikan perbedaan dengan Rusia melalui pembicaraan trilateral, akan tetapi permintaan Yanukovych tersebut juga ditolak oleh pihak Uni Eropa. Pihak Uni Eropa menyatakan bahwa tidak akan membiarkan negara ketiga untuk ikut campur dengan urusan Ukraina dan Uni Eropa dan tidak memberikan negara lain mendapatkan hak veto.

Isi dari perjanjian DCFTA antara Ukraina dan Uni Eropa adalah kesepakatan tersebut bertujuan membentuk suatu asosiasi politik dan perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa. Dengan adanya kesepakatan perjanjian tersebut akan mendekatkan hubungan Ukraina terhadap Uni Eropa dan adanya saluran untuk dialog politik yang menetapkan aturan dasar mengenai kerjasama di bidang energi, transportasi, dan pendidikan. Perjanjian ini mengharuskan Ukraina untuk melaksanakan reformasi dan menghormati hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, dan penegakan hukum. Kesepakatan tersebut juga menyediakan kesempatan lebih besar di bidang lapangan pekerjaan, dan perjalanan bebas tanpa visa. Perjanjian DCFTA secara substansial merupakan kerja sama ekonomi yang lebih mendalam antara Ukraina dan Uni Eropa dengan peniadaan bea masuk dan melarang pembatasan perdagangan meskipun dengan batasan-batasan tertentu seperti hasil pertanian yang mendapat pengecualian.

4.1.3 Kesepakatan Rusia dan Ukraina

Pada tanggal 17 Desember 2013, Presiden Yanukovych dan Vladimir Putin menandatangani kesepakatan antara Ukraina dan Rusia. Dalam kesepakatan tersebut disepakati bahwa Rusia memberikan penjamin sebesar \$15 miliar dollar dan pemotongan harga gas sebesar \$268 per barrel dari harga sebelumnya yakni sebesar \$400 per barrel kepada Ukraina. (Stem, 2013) Potongan harga gas bergantung pada review kuartal yang harus disetujui oleh pihak Ukraina dan Rusia dan

yang berhak membatalkan potongan harga adalah Rusia. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh presiden Yanukovych di tengah protes yang dilakukan oleh rakyat di Ukraina agar pemerintahan Ukraina lebih dekat dengan Eropa dan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Mengenai kesepakatan tersebut, parlemen Ukraina mendapat tentangan dari partai oposisi seperti Batkivshchyna, UDAR dan Svoboda untuk menunda penandatanganan kesepakatan antara Rusia dan Ukraina tersebut. (Isachenkov, 2013) Menurut Presiden Yanukovych bahwa kesepakatan antara Ukraina dan Rusia dilakukan karena keadaan ekonomi Ukraina yang terdesak. Hal tersebut juga harus dikoordinasikan dengan negara CIS yang lain. Presiden Yanukovych juga menambahkan bahwa kesepakatan antara Rusia dan Ukraina kali ini harus benar-benar dipelajari agar tidak terulang kesalahan-kesalahan dalam kerjasama antara kedua negara seperti periode-periode sebelumnya. Yanukovych juga menambahkan bahwa Ukraina dan Rusia juga harus memperkuat kerjasama lintas perbatasan dan antar negara guna menciptakan keadaan yang nyaman bagi rakyat-rakyatnya.

Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov menyatakan bahwa kesepakatan antara Ukraina dan Rusia dapat menyelamatkan Ukraina dari kebangkrutan dan keruntuhan sosial dengan keadaan ekonomi Ukraina yang sedang tidak stabil. Azarov juga menyatakan bahwa kesepakatan perjanjian perdagangan bebas antara

Ukraina dan Uni Eropa akan memaksa Ukraina mengikuti aturan ketat yang diberlakukan oleh IMF. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa kesepakatan antara Rusia dan Ukraina hanyalah sebatas tindakan kerjasama persaudaraan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun serta tidak melihat kondisi demonstrasi yang terjadi di pusat kota Kiev dan penangguhan kesepakatan antara Ukraina dan Uni Eropa mengenai perjanjian perdagangan bebas. Dengan adanya perjanjian tersebut, Rusia berkomitmen pada peraturan tentang regulasi impor gas dari Ukraina yang pernah ada yakni sebelum pertengahan bulan agustus 2013. Vladimir Putin mengatakan bahwa dengan adanya perjanjian antara Rusia dan Ukraina akan membuat Gazprom untuk menurunkan harga gas alam ke level paling murah untuk diekspor ke Ukraina. Harga gas alam dapat ditinjau setiap tiga bulan sekali.

Pada tanggal 9 Januari 2014, Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov menyatakan bahwa adanya kesepakatan antara Ukraina dan Rusia akan menguntungkan Ukraina di masa depan yaitu dengan semakin banyak lapangan pekerjaan dan jaminan anggaran yang akan menjadi basis pengembangan industri domestik Ukraina. Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov mengundurkan diri pada tanggal 28 Januari 2014. Dengan mundurnya Azarov, Rusia memberlakukan pengendalian dan pembatasan terhadap semua barang ekspor Ukraina ke Rusia. (Choursina,2014)

4.2 Aksi Kolektif Rakyat Ukraina

Protes dari sebagian rakyat Ukraina yang berubah menjadi demonstrasi massal menuntut pemerintahan Ukraina untuk berintegrasi yang lebih kuat dengan Uni Eropa. Demonstrasi massa di Ukraina bermula pada tanggal 21 November 2013 ketika keputusan presiden Yanukovych memutuskan menunda pembicaraan dengan Uni Eropa mengenai perjanjian ekonomi *Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA). Penundaan pembicaraan yang dilakukan oleh presiden Yanukovych memicu kemarahan rakyat Ukraina. Rakyat beranggapan bahwa kerja sama dengan Uni Eropa akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Ukraina. Rakyat Ukraina juga tidak menginginkan negaranya untuk bekerja sama dengan bekas negara induknya yaitu Rusia setelah adanya argumen dari presiden Yanukovych bahwa kerjasama antara Ukraina dengan Uni Eropa akan membahayakan perdagangan Ukraina dengan Rusia. Para demonstran menolak untuk meninggalkan pusat kota Kiev sampai tuntutan mereka dipenuhi. Tuntutan tersebut adalah pemerintah harus melepaskan demonstran yang dipenjara, menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa, dan perubahan Konstitusi di Ukraina, dan Yanukovych harus mengundurkan diri.

Sekitar 100.000-500.000 orang berkumpul dan berunjuk rasa di Kiev yang menyebabkan terjadinya bentrok di dekat gedung kepresidenan. Selain itu, sejumlah demonstran yang menggunakan senjata api dihalau oleh polisi anti huru-hara menggunakan gas air mata. Hal tersebut

mengakibatkan puluhan demonstran serta 100 polisi mengalami luka-luka.

Pada 16 Januari 2014, Parlemen Ukraina (*Verkhovna Rada*) bidang hukum memberi sanksi berat bagi pelaku kerusuhan di Kiev. Hal itu mengundang aksi antipemerintah yang lebih besar dan berimbas pada penggulingan pemerintahan di Ukraina. Aksi tersebut mengakibatkan 80 warga Ukraina meninggal dan sekitar 700 orang lainnya luka-luka.

Krisis politik yang terjadi di Ukraina adalah massa yang terorganisir karena negosiasi yang dilakukan oleh presiden Yanukovich dan Uni Eropa ditunda menghasilkan massa termobilisasi untuk menentang keputusan presiden Yanukovich yang lebih memilih menerima bantuan dana serta potongan harga pembelian gas dari Rusia. Massa yang termobilisasi bergabung menjadi suatu aksi kolektif yang mempunyai kepentingan yang sama dan mulai menduduki balai kota Kiev dan lapangan merdeka guna menyuarakan hak bahwa Ukraina adalah anggota dari Eropa dan menolak keputusan dari presiden Yanukovich yang bekerja sama dengan mantan negara induknya yaitu Rusia. Hal tersebut berdasar pada teori Charles Tilly "*Mobilization Model*". Pihak pemerintah Ukraina mengambil tindakan atas demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Ukraina dengan menugaskan polisi guna menghalau demonstrasi tersebut. Rakyat melawan larangan berdemonstrasi yang menghasilkan bentrokan antara rakyat dan polisi. Hal tersebut berdasar

pada teori Charles Tilly tentang "*Collective Violence*"

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis politik di Ukraina pada tahun 2013 adalah krisis legitimasi dan adanya keinginan rakyat Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa sedangkan Presiden Yanukovich memilih melakukan kesepakatan dengan Rusia. Krisis Legitimasi terjadi karena adanya kekecewaan dari rakyat Ukraina terhadap pemerintahan Victor Yanukovich mengenai penundaan pembicaraan *Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA) antara Ukraina dengan Uni Eropa. Rakyat Ukraina menginginkan kerja sama yang lebih mendalam dan komprehensif antara Ukraina dan Uni Eropa. Kerja sama antara Ukraina dan Uni Eropa juga mencakup aspek-aspek ekonomi lainnya seperti pembebasan visa, penambahan lapangan kerja, peniadaan bea masuk dalam kegiatan ekspor impor dan tidak adanya larangan pembatasan dalam penjualan hasil sumber daya alam meskipun masih ada batasan-batasan tertentu seperti hasil pertanian yang mendapat pengecualian. Akan tetapi, pemerintahan Victor Yanukovich menerima tawaran kesepakatan dari Rusia yakni menerima dana talangan sebesar US\$ 15 miliar dan potongan harga jika mengimpor gas sebesar \$268 dari Rusia.

Selain itu, keinginan rakyat agar pemerintah Ukraina tetap melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dan menolak kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak Rusia. Ketidakpuasan rakyat Ukraina

ini mengakibatkan rakyat menginginkan perubahan pemerintahan Ukraina dengan melakukan demonstrasi secara massal menentang keputusan pemerintah Ukraina yang menunda pembicaraan *Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA) antara Ukraina dengan Uni Eropa. Penundaan yang dilakukan oleh presiden Yanukovich membuat rakyat marah karena mereka menganggap bahwa bekerja sama dengan Uni Eropa akan membawa dampak positif di aspek perekonomian Ukraina. Demonstrasi yang dilakukan hingga menyebabkan jatuhnya korban baik dari pihak demonstran ataupun pihak polisi yang menghalau demonstrasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Easton, David. 1979. *A System Analysis of Political Life*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Leftwich, Adrian. 1984. *What is Politics? The Activity and Its Study*. Oxford and New York: Blackwell.
- Mahardika, Timur. 2000. *Gerakan Massa*. Yogyakarta: LAPERA.
- Mas'ood, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat analisis dan Teorisi*, Yogyakarta: PAU-SS-UGM.
- Plano, Jack C. 1982. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shukri, Ahmad & Youssuf, Rohman .2003. *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*. Johor. Universiti Teknologi Malaysia.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tilly, Charles. 1977. *From Mobilization to Revolution*. Michigan: University Of Michigan.
- Tilly, Charles. 2003. *The Politics of Collective Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Warren, Kenneth F. 2008. *Encyclopedia of U.S. Campaigns, Elections, and Electoral Behavior*. California: SAGE Publication.
- Internet:**
- Anonim. 2013. *Dialog diharapkan akhiri protes Ukraina*, BBC Indonesia diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/12/131202_ukraina.shtml 13 Desember 2013
- Anonim. Juni 2014. *Parlemen Ukraini Memecat Presiden Viktor Yanukovich*. VOA Islam. Diakses dari <http://www.voaislam.com/read/analysis/2014/02/23/29216/parlemen-ukraini-memecat-presiden-viktor-yanukovich/#sthash.YiqtkuIO.dpbs> 9 Juni 2014
- Anonim. 2014. *Krisis Politik Ukraina, Korban Terus Berjatuhan*, Beritakaltara.com diakses dari <http://beritakaltara.com/?p=3044> 21 Februari 2014.
- Choursina, Kateryna. 2014. *Ukraine at Impasse on Amnesty After Russia Warns on Aid*. Bloomberg. Diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/2014-01-29/russia-raises-stakes-for-ukraine-as-yanukovich-digs-in.html> . 1 November 2014.
- Isachenkov, Vladimir. 2014. *Putin: Russia to buy \$15 billion in Ukraine bonds*. USA TODAY. Diakses dari <http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/12/17/russia-ukraine-bonds-putin/4058059/> . 27 Oktober 2014.
- Kramer, E Andrew. 2014 *Ukrainian Prime Minister Resigns as Parliament Repeals Restrictive Laws*, The New York Times. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2014/01/29/wor>

- [ld/europe/ukraine-prime-minister-resign.html](#) . 26 Februari 2014.
- Kuzmin, Denys. 2014. *ANALYSIS OF THE EU – UKRAINE RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE ASSOCIATION AGREEMENT AND RELATED DOCUMENTS AND THE EU 2014-2020 FINANCIAL PERSPECTIVE* , (Odesa National University,2012) Hlm. 1 diakses dari [http://www.nytimes.com/2014/01/23/world/europe/ukraine-protests.html?_r=0](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.project-bridge.eu%2Fdatoteke%2FActions2012%2FBRIDGE-ANALYSIS%2520OF%2520THE%2520RELATIONS.pdf&ei=_uYdU8roMMiMrQfw_YDYDQ&usg=AFQjCNFvABAU9MChG_OiJLi9wMX0DJCCcSg&ig2=BpBDUvNK26YyV5N66KIRpA&vm=bv.62578216.d.bmk . 10 Maret 2014.</p>
<p>Herszenhorn, David M. 2014. <i>Unrest Deepens in Ukraine as Protests Turn Deadly</i>, The New York Times. Diakses dari <a href=) 26 Februari 2014.
- Nicolas. 2014. *Stealing Their Dream: Viktor Yanukovich Is Hijacking Ukrainians' European Future*. Diakses dari <http://news.kievukraine.info/2013/11/stealing-their-dream-viktor-yanukovich.html> . 25 Oktober 2014.
- Oliphant, Roland. 2014. *Viktor Yanukovich leaves behind palace monument to greed and corruption*. The Telegraph. Diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10657109/Viktor-Yanukovich-leaves-behind-palace-monument-to-greed-and-corruption.html> . 22 Oktober 2014.
- Parusinski, Jakub. 2014. *Ukraine inches up on international corruption index*. KyivPost. Diakses dari <http://www.kyivpost.com/content/ukraine/ukraine-inches-up-on-international-corruption-index-317159.html>. 22 Oktober 2014.
- Primus, Josephus. 2014. *Para Pemimpin UE Teken Kerja Sama dengan Ukraina*, Kompas.com diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/1855440/Para.Pemimpin.UE.Teken.Kerja.Sama.dengan.Ukraina..> 22 Maret 2014.
- Smith, Paul. 2012. *Budget 2013: the moon for the east, west – minuscule*. Diakses dari <http://www.epravda.com.ua/columns/2012/12/24/352306/> . 22 Oktober 2014.
- Stern, David. 2013. *Russia offers Ukraine major economic assistance*. BBC News Europe. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-25411118> . 1 November 2014.
- Thomas,Emily. 2014. *Ukraine opposition demand answers after Putin deal*, BBC. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-25427034>. 6 Februari 2014.
- Tia, Heppy. 2014. *Ukraina Menuju Perang Sipil* . Jawa Pos News Network. Diakses dari <http://www.jpnn.com/read/2014/01/31/214018/Ukraina-Menuju-Perang-Sipil-> . 20 Februari 2014.
- Tkachuk, Viktor. 2014. *People First: The latest in the watch on Ukrainian democracy*. KyivPost. Diakses dari <http://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/people-first-the-latest-in-the-watch-on-ukrainian-democracy-5-312797.html>. 22 Oktober 2014.
- Zinets, Natalia. 2014. *EU leaders set for tough table-talk with Ukraine's Yanukovich*. Reuters. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2013/11/28/us-ukraine-eu-idUSBRE9AR0CL20131128> . 24 oktober 2014.